

Keberhasilan Kebijakan Pemerintah Korea Selatan Dalam Integrasi Migran Korea Utara di Korea Selatan tahun 2020-2021

Danu Himawan¹, Saherimiko², Dewi Suratiningsih³

TransBorders*

Abstract

Using the concept of migrant integration, this research explains the successful integration in a systemic and value manner of North Korean migrants in South Korea. Systemic integration was successfully encouraged by the re-education program through Hanawon, and resettlement support facilitated by the government. Second, the Korea Hana Foundation, an organization supported by the Korean ministry of unification, also succeeded in encouraging value integration by building social relations between indigenous people and North Korean migrants. Apart from social relations in Korea, the Hana Foundation also serves as a marker for the integration of North Korean migrants. This research found that the success of the South Korean government in dealing with integration issues, has successfully increasing the participation of North Korean migrants in the country's economic activities, most of them feel they have lived more prosperously than before they migrated to South Korea.

Keywords: South Korea, Integration, Korea Hana Foundation, Hanawon

Abstrak

Menggunakan konsep integrasi migran, penelitian ini menjelaskan tentang keberhasilan integrasi migran Korea Utara di Korea Selatan secara sistemik dan nilai. Pertama integrasi sistemik berhasil didorong oleh program edukasi kembali melalui Hanawon, dan bantuan permukiman kembali yang difasilitasi oleh pemerintah, Kedua Korea Hana Foundation sebuah organisasi yang didukung oleh kementerian unifikasi Korea juga berhasil mendorong integrasi nilai dengan membangun hubungan sosial antar masyarakat asli dan migran Korea Utara, selain dalam hubungan sosial Korea Hana Foundation juga bertugas sebagai penanda integrasi migran Korea Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, keberhasilan pemerintah Korea Selatan dalam menangani masalah integrasi, meningkatkan partisipasi migran Korea Utara dalam aktifitas perekonomian negara, sebagian besar dari mereka merasa telah hidup lebih sejahtera dari sebelum mereka bermigrasi ke Korea Selatan.

Kata kunci: Korea Selatan, Integrasi, Korea Hana Foundation, Hanawon

Pendahuluan

Fenomena migrasi di era globalisasi biasanya disebabkan oleh adanya tuntutan ekonomi yang tinggi, serta faktor-faktor

sosial yang mempengaruhi hidup masyarakat sehingga menjadi faktor pendorong untuk berpindah dan menetap di tempat baru tanpa ada batas pada jarak

¹ Prodi Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura Pontianak

² Prodi Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura Pontianak

³ Prodi Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura Pontianak

* Jurnal Hubungan Internasional Fisip UNPAS

Email: trans'borders@unpas.ac.id

tempat tinggal demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak⁴.

Fenomena ini bermula dari hasil akhir dari perang Dunia ke II yang menyebabkan Peninsula Korea terbagi menjadi dua negara. Fenomena ini bermula dari hasil akhir dari perang Dunia ke II yang menyebabkan Peninsula Korea terbagi menjadi dua negara. Di bawah pembagian geopolitik ini kedua negara tersebut dipisahkan oleh perbatasan yang hampir tidak bisa ditembus demi mencegah siapapun yang menyeberang ke sisi lain.⁵

Migrasi bermula dari sebagian kecil warga Korea Utara mulai berusaha melarikan diri ke Korea Selatan setelah berakhirnya perang Korea (1950-1953). Angka pelarian tersebut kemudian terus meningkat tajam hingga pada tahun 1980-an akibat perekonomian negara yang jatuh secara drastis. Peningkatan jumlah warga yang melarikan diri dari Korea Utara tak hanya berhenti disitu, pada tahun 1990 an Korea Utara kembali dihadapi masalah bencana alam berupa kekeringan yang dikenal dengan "The Great Famine" yang diperkirakan telah mengakibatkan kematian ratusan ribu hingga jutaan orang karena kekurangan pangan.⁶

Sejak "The Great Famine" warga Korea Utara telah menderita dari kelaparan dan krisis pangan berkepanjangan yang berlangsung selama beberapa dekade. Kelaparan dan ketidakstabilan pangan

menjadi salah satu faktor yang mendorong warga Korea Utara untuk bermigrasi⁷. Selain krisis pangan, warga Korea Utara pada saat ini juga hidup dengan kebebasan yang terbatas, mereka hanya dapat mengakses dan memperoleh informasi dari luar negeri berdasarkan apa yang telah disaring oleh pemerintah⁸.

Selanjutnya kondisi ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong warga Korea Utara untuk bermigrasi, meskipun Korea Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah kondisi ekonomi yang dimilikinya sangat buruk. Sistem ekonomi yang terpusat pada pemerintah, mengakibatkan kesulitan bagi warga untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang cukup. The Bank Of Korea menunjukkan bahwa GDP Korea Utara mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen sejak tahun 2020, yang merupakan angka kontraksi terendah sejak 1998⁹.

Pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara menjadi faktor paling signifikan dalam mempengaruhi keputusan warga Korea Utara untuk melakukan migrasi. Pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Korea Utara terhadap warganya diantaranya mencakup penahanan sewenang-wenang, penghilangan orang, eksekusi, dan penyiksaan. Selain itu, warga negara yang mencoba melarikan diri dari negara tersebut dianggap sebagai

⁴ Lee, E. (1966). S., 1966, "A Theory of Migration,". *Demography*, 3(1), hal 3-49.

⁵ Kim, Y. G. (2015). *The odyssey of North Korean defectors: Issues and problems in the migration process*. City University of New York, hal 1.

⁶ Chang, Yoonok., Stephan Heggard and Marcus Noland. 2008. "Migration Experiences of North Korean Refugees: Survey Evidence from China." Working Paper Series 8 (4): 1-26.

⁷ CNN. (2022). " Why some North Korean defectors return to one of the world's most repressive regimes". Diakses melalui

"<https://edition.cnn.com/2022/02/18/asia/north-korea-defectors-return-intl-hnk-dst/index.html>.

⁸ Human Right Watch.(2021).World Report North Korea 2021.Diakses Melalui"
<https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/north-korea>.

⁹ Al Jazeera. (2022).North Korea's economy shrinks for second straight year..Diakses melalui"
<https://www.aljazeera.com/economy/2022/7/27/north-koreas-economy-shrinks-for-second-straight-year-bok>".

pengkhianat dan dapat dihukum bahkan dengan hukuman mati.¹⁰

Berdasarkan data milik kementerian Unifikasi Korea, jumlah warga Korea Utara yang memasuki Korea Selatan setiap tahun sejak 1990-an telah mencapai lebih dari 33.000¹¹. Migran Korea Utara di Korea Selatan sendiri terbagi dalam empat kategori yakni, (1) pembelot politik, (2) migran pengungsi, (3) diaspora etnis Korea, dan (4) minoritas budaya¹². Pada saat ini motivasi dalam terjadinya migrasi warga Korea Utara ke Korea Selatan tak hanya lagi berdasarkan pada alasan ingin mencari keamanan dan kebebasan, namun juga melingkupi aspek sosial dan ekonomi.

Situasi sulit yang dialami di negaranya seperti krisis pangan yang telah terjadi selama beberapa dekade, yakni krisis ekonomi, kebebasan yang terbatas, dan pelanggaran HAM telah menjadi dasar yang kuat bagi warga Korea Utara untuk melarikan diri ke Korea Selatan dengan harapan mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu pada saat ini migran Korea Utara di Korea Selatan dapat diklasifikasikan sebagai pembelot politik "*Political Defector*" karena mereka telah membelot secara efektif dari rezim Korea Utara yang otoriter.

Pembelot Korea Utara sendiri pada dasarnya memiliki status politik unik yang membuat mereka berbeda dengan migran lain pada umumnya, status tersebut

diberikan untuk membedakan mereka dengan etnis Korea lainnya salah satunya (*Korean-Chinese*). Adapun status unik yang diberikan pada pembelot Korea Utara diantaranya adalah hak atas kewarganegaraan Korea Selatan yang berdasarkan pada klaim konstitusi Korea Selatan atas kedaulatan seluruh Peninsula Korea¹³. Pemberian status unik tersebut diberikan dengan alasan karena mereka dianggap sebagai sumber informasi berharga yang mengetahui tentang situasi di Korea Utara dan kehidupan di sana. Pemerintah Korea Selatan ingin memanfaatkan informasi yang dimiliki migran "pembelot" sebagai usaha mereka untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara dan mempromosikan reunifikasi Korea¹⁴.

Pemerintah Korea Selatan juga memberikan dukungan permukiman kembali kepada pembelot Korea Utara dalam bentuk bantuan keuangan, perumahan bersubsidi, bantuan pendidikan, dan insentif pekerjaan. Terlepas dari status kewarganegaraan dan mendapat hak atas dukungan dari pemerintah, terdapat beberapa pembelot Korea Utara yang merasa lebih rendah dari warga Korea Selatan dalam lingkungan sosial. Faktor tambahan yang mendasari masalah yang dihadapi pembelot Korea Utara disebabkan oleh masyarakat asli Korea Selatan yang xenophobia terkait nasionalisme etnis warga negara asing¹⁵.

¹⁰ Human Right Watch.(2021).World Report North Korea 2021. Melalui" <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/north-korea>".

¹¹ Kementerian Unifikasi. (2023). Settlement Support for North Korean Defectors . Diakses melalui"https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/watwedo/support/".

¹² Chung, B. H. (2008). "Between defector and migrant: Identities and strategies of North Koreans in South Korea". Korean studies, hlm 2-3.

¹³ Hough, J. (2022)." The contradictory effects of South Korean resettlement policy on North Koreans

in South Korea". Journal of Ethnic and Migration Studies, 48(20), hlm 7.

¹⁴ "The Guardian,(2019). "South Korea's 'unique' efforts to help defectors adapt to capitalism". Diaksesmelalui"<https://www.theguardian.com/world/2019/jan/28/south-koreas-unique-efforts-to-help-defectors-adapt-to-capitalism>".

¹⁵ Hough, J. (2022). "The racialization of North Koreans in South Korea: diasporic co-ethnics in the South Korean ethnolinguistic nation". Ethnic and Racial Studies, 45(4), hlm 1-3.

Migran “pembelot” Korea Utara tidak hanya menderita stigma sosial, tetapi juga mengalami penganiayaan, kecurigaan, dan diskriminasi dari banyak orang selatan¹⁶. Perilaku tersebut disebabkan karena adanya rasa superioritas atas darah murni Korea Selatan yang menjadi dasar dari terjadinya penindasan terhadap warga negara asing, migran, dan bahkan juga warga Korea Selatan yang berdarah campuran¹⁷. Akibat permasalahan yang dialami para migran “pembelot” Korea Utara tersebut menjadi penyebab mengapa integrasi menjadi sulit terjadi di Korea Selatan. Hal ini kemudian juga memicu terjadinya permasalahan-permasalahan dalam lingkup sosial-ekonomi lainnya, seperti sulitnya mendapat pekerjaan bagi migran “pembelot” Korea Utara.

Berdasarkan hasil data survey yang dilakukan pada tahun 2020-2021 oleh *Korea Hana Foundation* menunjukkan bahwa tiga faktor tertinggi dari terjadinya diskriminasi terhadap pembelot Korea Utara di Korea Selatan yakni, pertama perbedaan budaya komunikasi antara orang Korea Utara dan Selatan dengan angka 77%. kedua, adanya pandangan negatif terhadap eksistensi pembelot dari Utara di Selatan dengan angka 20,1%. dan ketiga, rendahnya pengetahuan profesional pembelot daripada warga asli Korea Selatan 13,6%¹⁸.

Dalam merespon masalah yang dihadapi, pemerintah Korea Selatan memberi bantuan melalui “*Resettlement Policy*” yang berlandaskan pada undang-undang *North Korean Defector Protection And Settlement Support Act*. Namun sebelum bantuan dalam permukiman kembali tersebut diberikan para migran “pembelot” pertama-tama harus menjalani proses edukasi kembali di Hanawon. Hanawon yakni sebuah pusat dukungan permukiman kembali (*resettlement center*) bagi pembelot Korea Utara yang telah dibentuk, dan didanai sejak 8 Juli 1999 oleh kementerian Unifikasi Korea¹⁹. Dalam dua dekade terakhir, terdapat sekitar 33.000 pembelot yang berhasil mencapai Korea Selatan kemudian diedukasi dan dipersiapkan kembali di Hanawon selama dua bulan sebelum diterjunkan ke masyarakat Korea²⁰.

Fasilitas yang didukung dan didanai oleh kementerian Unifikasi Korea sejak tahun awal terbentuknya tersebut digambarkan oleh sebagian orang sebagai rumah singgah sementara (*House of Unity*)²¹. Selanjutnya Kim Sung Kyung juga mengungkapkan bahwa program yang disediakan oleh *Hanawon resettlement center* tersebut berfokus kepada dua aspek yakni dukungan untuk kesehatan mental dan edukasi terkait pemahaman terhadap budaya di Korea Selatan.²²

¹⁶ The Conversation.2022. “The North Korean who went home: many defectors struggle against discrimination in the South”. melalui”<https://theconversation.com/the-north-korean-who-went-home-many-defectors-struggle-against-discrimination-in-the-south-174366>.”

¹⁷ Watson, Iain, (2012). “Paradoxical Multiculturalism in South Korea”, *Asian Politics & Policy*, 4 (2): hlm 1.

¹⁸ Korea Hana . (2021). “2021 Settlement Survey of North Korean Refugees in South Korea”. Diakses Melalui” <https://koreahana.or.kr/>”.

¹⁹ DetikNews.(2023).Melihat pusat adaptasi sosial pembelot korut di korsel.” Diakses melalui” [https://news.detik.com/foto-news/d-6816627/melihat-](https://news.detik.com/foto-news/d-6816627/melihat-pusat-pelatihan-adaptasi-sosial-pembelot-korut-di-korsel)

[pusat-pelatihan-adaptasi-sosial-pembelot-korut-di-korsel](https://news.detik.com/foto-news/d-6816627/melihat-pusat-pelatihan-adaptasi-sosial-pembelot-korut-di-korsel)”.

²⁰ Ji Da G.(2022). Inside Hanawon: How N. Korean defectors build a new life in S. Korea. Diakses melalui” www.koreaherald.com%2Fview.php%3Fud%3D20220710000202&usg=AOvVaw3NZNjSyki1ffbKJ7r0HNsr&opi=89978449”.

²¹ NK news 2022.” Settling in Seoul: How was the education center for new North Korean defectors?”. Diakses melalui” <https://www.nknews.org/2022/04/settling-in-seoul-how-was-the-education-center-for-new-north-korean-defectors/>.

²² Kim, S K, (2012). ‘Defector,’ ‘Refugee,’ or ‘Migrant’? North Korean Settlers in South Korea’s

Oleh karena itu selain mendapatkan edukasi terkait budaya, pembelot Korea Utara juga dapat menerima layanan kesehatan mental profesional seperti terapi individu, kelompok, di pusat kesehatan mental yang tersedia dalam rumah sakit umum Hana²³. Selain kedua aspek tersebut Hanawon juga menyediakan fasilitas pelatihan soft skill yang bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan pengetahuan umum seperti cara penggunaan ATM, Akses kereta cepat, cara kerja pemerintahan dan pengetahuan lain yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Setelah melewati Hanawon, melalui *resettlement policy* para migran “pembelot” akan diberi rumah sewa umum serta kebutuhan pokok yang cukup untuk beberapa hari.²⁴

Selain Hanawon, pemerintah Korea Selatan juga dibantu oleh adanya keterlibatan organisasi non-profit (NPO) yakni Korea Hana Foundation (KHF) yang juga dibentuk oleh kementerian unifikasi Korea seperti Hanawon. Dilansir dari situs resmi Koreahana, Korea Hana Foundation (KHF) dibentuk dengan tujuan untuk berkontribusi pada pemukiman kembali pembelot korea utara dan kementerian unifikasi Korea “pemerintah Korea Selatan”²⁵.

Kerangka Teoritis

Integrasi migran terbagi menjadi dua dimensi. Pertama adalah integrasi sistemik yaitu dalam sistem politik dan ekonomi, Kedua adalah integrasi nilai yaitu proses dan hasil pencapaian identitas dengan berbagi nilai-nilai bersama²⁶. Dalam integrasi migran juga terdapat empat elemen yang mempengaruhi proses terbentuknya integrasi diantaranya adalah: (yayasan, fasilitator, hubungan sosial dan alat penanda dalam integrasi).²⁷ Krechel juga mengklaim bahwa hanya ketika dua jenis integrasi tercapai, integrasi yang sebenarnya akan dapat terjadi.

Dalam masalah integrasi sosial yang dihadapi oleh migran “pembelot” Korea Utara diantaranya adalah kesenjangan sosial, kesulitan beradaptasi secara budaya, dan diskriminasi yang kemudian mengakibatkan mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dalam merespon hal tersebut pemerintah Korea Selatan membuat *resettlement policy* yang program kerjanya dijalankan melalui fasilitas Hanawon, diantaranya adalah pelatihan softskill, edukasi terhadap budaya modern Korea, kelas bahasa dan pelayanan kesehatan. Program tersebut dibentuk dengan tujuan untuk membantu para pembelot dalam beradaptasi sekaligus membentuk identitas sebagai warga negara Korea Selatan.

Changing Social Discourse”, North Korean Review, 8 (2): 94-110.

²³ Ji Da Gyum.(2022). Inside Hanawon: How N. Korean defectors build a new life in S. Korea. Diakses melalui” www.koreaherald.com%2Fview.php%3Fud%3D20220710000202&usg=AOvVaw3NZNjSyki1ffbKJ7r0HNsr&opi=89978449.

²⁴ BBC Indonesia.(2021).” Pembelot Korut: Apa yang terjadi ketika mereka tiba di Korea Selatan?”.Diakses melalui”<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56093415>.

²⁵ Korea hana.(2023). Who Are We. Diakses melalui”

<https://www.koreahana.or.kr/home/eng/contents.do?ptSignature=QnrvtOekxiPkIgsn74dfsX9h7xGZe5I5q%2BEmHCeDSBU%3D&menuPos=2>”.

²⁶ Reinhard K.(1999). Social integration, national identity and German unification. In: Marcus, J.T. (Ed.) Surviving the twentieth century: social philosophy from the Frankfurt school to the Columbia faculty seminars. New Brunswick: Transaction Publishers,hlm 85–95.

²⁷ Alastair.A dan Alison S. (2008) Understanding integration: a conceptual framework. Journal of Refugee Studies, 21(2),hlm 166–191.

Dengan kata lain Hanawon dapat disebut sebagai yayasan karena telah menyediakan program sesuai dengan *resettlement policy* Korea Selatan. Dalam hal ini pemerintah Korea Selatan sendiri berperan sebagai fasilitator dalam integrasi migran Korea Utara di Korea Selatan. Selanjutnya Korea Hana Foundation yang bertugas dibawah kementerian Unifikasi sebagai penanda integrasi serta pembangunan hubungan sosial migran Korea Utara dalam lingkungan masyarakat Korea Selatan.

Metode Penelitian

Metode deskriptif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, mendeskripsikan, mencatat, mengkaji serta menganalisis masalah integrasi yang dihadapi migran “pembelot” Korea Utara di Korea Selatan, dan kemudian menjelaskan bagaimana kebijakan permukiman kembali “resettlement” pemerintah Korea Selatan dapat menangani masalah tersebut berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, yang diperoleh dari berbagai media seperti, internet, jurnal, berita, ataupun situs resmi pemerintah Korea Selatan.

Pembahasan

Proses Masuknya Migran

Pada tahun 2020-2021 sebanyak lebih dari 30,000 warga Korea Utara yang berusaha untuk menempuh perjalanan lintas perbatasan demi mencari keamanan di Korea Selatan. Sebagian dari mereka menjadikan pembelotan sebagai salah satu pilihan terakhir mereka untuk menyelamatkan diri untuk bertahan hidup, karena selain isu kemiskinan mereka juga

harus menghadapi masalah kelaparan akibat kekurangan pangan dan juga tekanan dari rezim komunisme pemerintah Korea Utara. Maka dari apapun alasan mereka untuk melarikan diri dari negaranya, migran Korea Utara tersebut banyak yang mengalami trauma (PTSD), setelah berhasil menjalani hidup di Korea Selatan.

Ramsey dalam *The Borgen project*, mengungkapkan bawa proses pelarian diri yang dilakukan para pembelot, pada dasarnya terdapat dua pilihan ketika memutuskan untuk melarikan diri adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Opsi pertama, mereka dapat menyeberang melalui border China di sebelah utara yang diawasi oleh kedua militer China dan Korea. Setelah sampai di China para pembelot akan kesulitan dalam mencari keamanan ataupun bantuan, karena hukum di China melarang keras bagi warga nya yang berusaha untuk membantu pembelot Korea Utara. Oleh karena itu melintasi border dengan melewati China akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan.
- 2) Opsi kedua, ini terkenal karena kesulitan dan risikonya berusaha melintasi Zona Demilitarisasi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ini adalah perbatasan yang paling dijaga ketat dan dibentengi di Bumi, dengan penjaga berpatroli di kedua sisi selama 24 jam, pagar kawat berduri, ladang ranjau, sensor, dan dinding beton setebal 19 meter. Penyeberangan semakin tidak mungkin Sejak Kim Jung-Un menutup perbatasan sepenuhnya pada tahun 2020 untuk membendung aliran COVID-19. Oleh karena itu, mayoritas pembelot melarikan diri ke utara melintasi perbatasan Tiongkok .

²⁸ Ramsey G.(2022). Life After Escape for North Korean Defectors . Diakses

melalui”<https://borgenproject.org/life-after-escape-for-north-korean-defectors/>”.

Dasar hukum yang mengatur migran Korea Utara

Dalam upaya mengintegrasikan migran “pembelot” Korea Utara, pemerintah Korea Selatan memberikan status legal kepada mereka berdasarkan pada, hukum yang telah dibentuk secara khusus dalam mengatur migran “pembelot” Korea Utara di Korea Selatan yang di implementasikan dalam undang-undang *North Korean Defector Protection And Settlement Support Act* diantaranya adalah sebagai berikut²⁹:

Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal (1), adalah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu penduduk Korea Utara melarikan diri dari wilayah utara Garis Demarkasi Militer yang dilindungi dari Republik Korea Selatan, agar dapat secepat mungkin untuk beradaptasi di semua aspek kehidupan, termasuk bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

a) Istilah “pembelot” dalam North Korean Defector Protection And Settlement Support Act pasal (2) ayat (1), dapat diartikan sebagai penduduk yang melarikan diri dari Korea Utara, berarti orang-orang yang bertempat tinggal, berketurunan, pasangan, tempat kerja, dan lainnya yang berasal dari wilayah utara Garis Demarkasi Militer “Korea Utara”, dan mereka yang tidak memperoleh kewarganegaraan setelah melarikan diri dari Korea Utara.

b) Istilah "orang yang berhak mendapatkan perlindungan" dalam North Korean Defector Protection And Settlement Support Act pasal (2) ayat (2), ditujukan pada penduduk yang melarikan diri dari Korea Utara yang diberi perlindungan dan dukungan sesuai dengan Undang-Undang ini.

c) Istilah "fasilitas pendukung" dalam North Korean Defector Protection And Settlement Support Act pasal (2) ayat (3), berarti fasilitas yang didirikan oleh pemerintah “Kementerian Unifikasi” yang dioperasikan untuk memberi perlindungan dan dukungan permukiman bagi mereka yang berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Pasal (10) ayat (1): tentang pendirian fasilitas pendukung permukiman.

d) Istilah "uang atau barang perlindungan" dalam North Korean Defector Protection And Settlement Support Act pasal (2) ayat (4), ditujukan pada bantuan uang atau barang yang diserahkan, atau dipinjamkan kepada mereka yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-undang ini.

Resettlement Policy Pemerintah Korea Selatan

Republik Korea Selatan (ROK) bercita-cita untuk diakui sebagai kekuatan normatif, yang mematuhi konvensi kemanusiaan internasional. Perlakuannya terhadap pegungsi, khususnya terhadap migran “pembelot” Korea Utara, merupakan tolak ukur penting untuk pencapaian aspirasi tersebut. Korea Selatan

²⁹ Law Kr.(2021). “North Korean Defector Protection And Settlement Support Act”.Diakses melalui

“<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?chrClsCd=010203&lsiSeq=206648&viewCls=engLsInfoR&urlMode=engLsInfoR#0000>”

menawarkan perlindungan dan pengakuan konstitusional yang luas kepada pembelot Korea Utara, serta dukungan material yang signifikan untuk keberhasilan integrasi mereka ke dalam masyarakat Korea Selatan³⁰.

Dalam upaya untuk mengatasi segala permasalahan yang dialami para pembelot seketika menetap di Korea Selatan, pemerintah telah membentuk kebijakan dalam beberapa dekade terakhir yang bertujuan untuk membantu para pembelot dalam beradaptasi di masyarakat Korea. Dalam rancangan terbaru kebijakan permukiman kembali yakni pada tahun 2018-2020 tersebut akan berlandaskan sesuai dengan undang-undang *North Korean Defector Protection And Settlement Support Act*.

Tabel. Perkembangan Kebijakan Migran Korea Utara

Periode	Kebijakan
1997-1999	Fokus pada kebijakan mandiri dan berkelanjutan
1999-2004	Memperkuat bantuan edukasi dan sistem permukiman kembali secara spesifik
2004-2006	Pembentukan kebijakan bantuan keuangan insentif dan bantuan permukiman
2006-2008	Memperluas pengakuan atas kualifikasi pendidikan dan dukungan pekerjaan
2009	Membentuk program adaptasi sosial dalam komunitas masyarakat
2010	Pembentukan organisasi Hana Foundation
2013-2014	Memperkenalkan program pembangunan aset dan mengawasi survey permukiman

³⁰ Eunkoo, dan Howe. (2021). "North Korean Refugee Integration Policy in South Korea: Human Security Challenges." *Asian International Studies Review* 22.1".

³¹ Kementerian unifikasi. (2019). "Unification White Paper. Seoul: Ministry of Unification".

2015-2017	Rencana dukungan permukiman pertama untuk pengungsi korea utara dari 2015-2017
2018-2020	Rencana dukungan permukiman pertama untuk pengungsi korea utara dari 2018-2020

Sumber: Eunkoo dan Howe 2021

Pemerintah Korea Selatan belakangan ini telah membentuk kebijakan integrasi yang dikembangkan sebagai rencana jangka panjang. Pemerintah Korea Selatan, mengumumkan rencana dukungan pertama untuk pembelot Korea Utara, mulai dari 2015 hingga 2017, dan berlanjut kepada rencana dukungan penyelesaian kedua untuk pengungsi Korea Utara, mulai dari 2018 hingga 2020. Secara khusus, rencana kedua mencakup 22 proyek prioritas dan tugas untuk dua tahun dan mendorong dan meningkatkan kemandirian dan kemandirian pengungsi Korea Utara.³¹

Korea Hana Foundation Dalam Hubungan Sosial dan Penanda Integrasi Pembelot

Sebagai agen pemerintah untuk Kementerian Unifikasi Korea (MOU), *Korea Hana Foundation* juga merencanakan dan menerapkan kebijakan integrasi utama bagi migran "pembelot" Korea Utara yakni resettlement policy. Korea Hana Foundation (KHF) memiliki empat (4) tugas utama yakni³²:

1. Bantuan permukiman kembali awal mulai dari perabotan rumah tangga dan voucher listrik.
2. Menyediakan layanan ketenagakerjaan seperti program kerja yang tersistem, program yang disesuaikan untuk membantu

³² Korea Hana.(2023). "Who we are", Diakses melalui"

<https://www.koreahana.or.kr/home/eng/contents.do?ptSignature=QnrvtOekxiPkIgsn74dfsYRAqgXaIX2EzU5d7cx8ePM%3D&menuPos=2>

pengungsi menemukan potensi mereka, dan proyek swadaya, dukungan pertanian dan kewirausahaan.

3. Bantuan Pendidikan seperti beasiswa dan edukasi bahasa Inggris.
4. Bantuan Korea Hana Foundation yang terakhir adalah mempromosikan integrasi dengan mencari dan menyebarkan kasus keberhasilan hidup migran Korea Utara di Korea Selatan, membuat kampanye iklan di media sosial, dan membentuk kelompok pendukung terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas.

Dalam membangun hubungan sosial, Korea Hana Foundation (KHF) berupaya untuk menciptakan komunikasi dan harmoni antara Korea Selatan dan migran “pembelot” Korea Utara dalam mewujudkan mimpi reunifikasi Korea. Namun, pemahaman terhadap pembelot Korea Utara masih kurang di kalangan masyarakat Korea Selatan.

Oleh karena itu Korea Hana Foundation, perlu dalam komitmennya untuk memperdalam pemahaman terhadap pembelot Korea Utara, juga melakukan berbagai penelitian yang memberikan analisis mendalam dan rekomendasi kebijakan mengenai isu-isu politik, sosial, dan ekonomi mengenai pembelot Korea Utara.

Keberhasilan Kebijakan Permukiman Kembali Pemerintah Korea Selatan Dalam Integrasi Migran Korea Utara Di Korea Selatan

Kebijakan permukiman kembali pemerintah Korea Selatan melalui Hanawon, dan organisasi *Korea Hana*

Foundation (KHF) berhasil membantu pemerintah Korea Selatan dalam integrasi migran Korea Utara di Korea Selatan pada tahun 2020-2021. Menurut Jin-Yoon dalam konsep integrasi migran, menyebutkan bahwa beberapa indikator yang harus dipenuhi agar integrasi sepenuhnya dapat terjadi.

Dalam konsep integrasi migran terdapat dua dimensi yakni integrasi migran yakni, pertama: integrasi sistemik adalah integrasi sistem politik dan ekonomi, kedua: integrasi nilai adalah proses dan hasil pencapaian identitas bersama dengan berbagi nilai-nilai bersama³³. Kemudian dalam konsep integrasi migran juga disebutkan bahwa terdapat empat elemen utama dalam terbentuknya integrasi diantaranya adalah: (yayasan, fasilitator, hubungan sosial dan alat penanda dalam integrasi)³⁴. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, Hanawon berperan sebagai yayasan, kebijakan pemerintah sebagai fasilitator, organisasi Korea Hana Foundation dalam membentuk hubungan sosial, dan sebagai penanda dalam integrasi.

1. Hanawon Sebagai Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tujuan didirikannya untuk memberikan bantuan dalam hal sosial.³⁵ Hanawon dapat diartikan sebagai yayasan yang dibangun oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberi bantuan sosial kepada migran “pembelot” Korea Utara yang datang ke Korea Selatan. Sebagai yayasan yang dibangun oleh Kementerian Unifikasi sejak tahun 1999, Hanawon telah berhasil dalam membantu para pembelot dalam proses integrasi sosial nya di lingkungan masyarakat Korea Selatan. Kurikulum program edukasi kembali yang diberikan

³³ Reinhard K.(1999). Social integration, national identity and German unification. In: Marcus, J.T. (Ed.) *Surviving the twentieth century: social philosophy from the Frankfurt school to the Columbia faculty seminars*. New Brunswick: Transaction Publishers,hlm 85–95.

³⁴ Alastair.A dan Alison S. (2008). “Understanding integration: a conceptual framework”. *Journal of Refugee Studies*, 21(2),hlm 166–191.

³⁵ Zainul B.(1996). “Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik”, Bandung: PT Angkasa.hlm 367

oleh Hanawon kepada pembelot telah berhasil mendorong proses integrasi sistemik mereka di Korea Selatan.

Pelatihan dari program edukasi kembali ini sendiri ditetapkan dengan tujuan untuk membentuk kembali kestabilan emosi pembelot, mengatasi perbedaan budaya, dan menemukan motivasi untuk dapat hidup mandiri secara sosial dan ekonomi. Adapun proses dari program yang diberikan oleh Hanawon adalah sebagai berikut:³⁶

- a) Pertama Kesehatan Mental
Migran “pembelot” Korea Utara akan melakukan tes stabilitas emosional dan kesehatan selama 46 jam, yang terdiri mulai dari tes psikologi dan konseling, dan diakhiri pemeriksaan kesehatan dan perawatan.
- b) Kedua Tes Bakat dan Pelatihan Skill
Setelah melewati tes kesehatan, para pembelot akan dapat melakukan tes bakat dan bimbingan karir sebelum dapat memasuki fase pelatihan soft skill.
- c) Ketiga Promosi dan pemahaman masyarakat Korea Selatan
Dalam kelas ini para pembelot akan mempelajari sistem demokrasi dan ekonomi negara, sejarah, budaya, hukum kehidupan sehari-hari, dan praktik langsung seperti membeli barang di pasar.

Program edukasi kembali yang disediakan oleh Hanawon tersebut telah berhasil memberikan dampak pada para pembelot terutama dalam integrasi secara sistemik, terutama secara ekonomi. Keberhasilan dalam integrasi sistemik tersebut dapat dilihat berdasarkan data dari kementerian unifikasi Korea yang mana

terdapat sekitar dari 61,3% dari total migran “pembelot” Korea Utara pada tahun 2021 telah berkontribusi pada aktivitas ekonomi negara, dan sekitar 56,7% dari mereka telah memiliki pekerjaan. Berdasarkan survey Hana Foundation di tahun 2021, Jenis pekerjaan yang dimiliki pengungsi Korea Utara di Korea Utara diantaranya adalah: Perkerja dasar 26,7%, diikuti oleh Pekerja layanan (17,8%), Pekerja profesional (10,2%), Staf (10.1%), dan Teknisi mesin (8,8%).³⁷

Adanya peningkatan tersebut menandakan bahwa integrasi migran “pembelot” Korea Utara telah mengalami peningkatan secara ekonomi (integrasi sistemik) dalam masyarakat Korea Selatan telah meningkat secara signifikan dari dekade sebelumnya yang mana hanya 49,6% dari mereka yang berkontribusi dalam aktivitas ekonomi dan 44,9% memiliki pekerjaan. Selanjutnya survey tentang kepuasan para migran “pembelot” terhadap lingkungan kerjanya juga menunjukkan bahwa 60,3%, puas dengan pekerjaan mereka 60,3%, dan 68,8%, dari mereka memiliki hubungan pribadi yang baik .

2. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator dalam integrasi, pemerintah Korea Selatan telah melakukan beberapa upaya yang dapat membantu para migran “pembelot” agar dapat secepatnya terintegrasi dalam lingkungan sosial masyarakat Korea Selatan. Pertama adalah dengan memberikan status legal melalui penerapan undang-undang dalam mengelola migran Korea Utara ketika tiba di Korea Selatan. Melalui undang-undang *North Korean Defector Protection And Settlement Support Act*, pemerintah telah mengimplementasikan beberapa hukum yang berpihak kepada migran Korea Utara, salah satunya adalah kewajiban negara

³⁶ Kementerian Unifikasi (2013). “Manual for the Resettlement Support for North Korean Refugees”. Diakses melalui” <https://www.nkeconwatch.com/nk->

[uploads/Manual-for-the-Resettlement-Support-for-North-Korean-Refugees.pdf](https://www.nkeconwatch.com/nk-uploads/Manual-for-the-Resettlement-Support-for-North-Korean-Refugees.pdf) .

³⁷ Korea Hana Foundation (2021). “2021 Settlement Survey of North Korean Refugees in South Korea”. Diakses Melalui” <https://koreahana.or.kr/>”.

dalam memberi perlindungan, pemberian hak atas kewarganegaraan Korea Selatan. Setelah melewati pelatihan di Hanawon, bantuan permukiman inisial seperti keuangan, subsidi rumah, pendidikan, dan lainnya juga diberikan³⁸.

Bantuan tersebut, akan diberikan setelah menyelesaikan proses edukasi kembali melalui Hanawon kepada migran “pembelot” Korea Utara agar dapat mempercepat proses integrasi sosial mereka di lingkungan masyarakat Korea Selatan.

Melalui bantuan yang diberikan dari *resettlement policy* ini migran “pembelot” Korea Utara dapat merasakan kehidupan yang jauh lebih baik dan bebas ketimbang ketika mereka masih tinggal di negaranya. Pernyataan ini dapat dilihat melalui survey terhadap alasan mengapa mereka merasa bahagia hidup di Korea Selatan, survey menunjukkan bahwa terdapat empat alasan mengapa para migran “pembelot” ini dapat merasa bahagia di Selatan antara lain adalah: Saya bisa menjalani hidup bebas (30,8%), sebagai persentase tertinggi, (24,8%) menjawab saya bisa mendapatkan penghasilan sesuai dengan kinerja, dan terakhir menjawab Korea Selatan lebih nyaman secara ekonomi daripada Korea Utara (22,7%)³⁹.

Jika melihat kehidupan mereka di Korea Utara sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa sebagian besar dari mereka tidak dapat hidup dengan bebas seperti saat mereka berada di Korea Selatan. Hal ini karena pemerintah Korea Utara memberlakukan banyak restriksi dalam kehidupan sehari-hari salah satunya kebebasan dalam berpendapat ataupun

informasi mengenai dunia luar. Selanjutnya warga Korea Utara hingga pada saat ini bekerja dengan upah yang minim bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali pekerjaan hal ini disebabkan karena sistem pekerjaan di Korea Utara berbasis kepada kerja paksa.

Human Rights Watch menyebutkan bahwa banyak dari pekerjaan di Korea Utara, tidak dibayar atau hanya memberikan kompensasi pengganti yang minimal dalam bentuk makanan atau ransum lainnya. Kegagalan melapor ke pekerjaan yang ditugaskan bagi mereka yang mencoba mencari uang dengan cara lain dapat mengakibatkan dikirim ke kamp kerja paksa selama enam bulan hingga dua tahun⁴⁰.

Dalam artikel tersebut juga disebutkan alasan mengapa sebagian besar pekerjaan di Korea Utara tidak mendapatkan upah tidak lain disebabkan oleh runtuhnya perekonomian negara, perekonomian sejak Korea Utara pada tahun 2020 sangatlah buruk hal ini disebabkan karena sistem perekonomian negara yang hanya berpusat di pemerintahan saja⁴¹. Sedangkan di Korea Selatan meskipun harus melewati beberapa proses untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, upah minimum yang diberikan kepada pembelot cukup tinggi, hal ini tentu saja karena Korea Selatan memiliki sistem perekonomian yang jauh lebih baik ketimbang Korea Utara⁴².

3. Korea Hana Foundation Dalam Hubungan Sosial dan Penanda Integrasi

Organisasi yang didirikan berdasarkan keyakinan Undang-Undang tentang perlindungan dan dukungan pemukiman bagi para pembelot Korea Utara. KHF dibentuk oleh kementerian

³⁸ Kementerian unifikasi. (2019). “Unification White Paper. Seoul: Ministry of Unification”.

³⁹Korea Hana Foundation (2021). “2021 Settlement Survey of North Korean Refugees in South Korea”. Diakses Melalui” <https://koreahana.or.kr/>”.

⁴⁰ Human Right Watch.(2019). “North Korea Events of 2018” .Diakses Melalui” <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/north-korea>”.

⁴¹ Al Jazeera. (2022).”North Korea's economy shrinks for second straight year”.Diakses melalui” <https://www.aljazeera.com/economy/2022/7/27/north-koreas-economy-shrinks-for-second-straight-year-bok>”.

⁴² Human Right Watch.(2012.). “North Korea: Economic System Built on Forced Labor”. Diakses melalui” <https://www.hrw.org/news/2012/06/13/north-korea-economic-system-built-forced-labor>”.

unifikasi dengan tujuan untuk membantu agar migran “pembelot” Korea Utara dapat menetap dengan stabil dan mewujudkan harapan dan impian mereka di Korea Selatan, untuk mewujudkan hal tersebut *Korea Hana Foundation* menyediakan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan para pembelot.

Berdasarkan dari tugas utama yang sebelumnya telah disebutkan, *Korea Hana Foundation* ditetapkan sebagai penanda integrasi. Hal ini dapat dilihat dari peran tugas keempat yakni integrasi yang cenderung menjadi acuan dalam menandakan bahwa migran “pembelot” Korea Utara di Korea Selatan telah dapat untuk hidup sejahtera. Dalam menandakan integrasi sosial, *Korea Hana Foundation* memproduksi video berupa kampanye iklan pemukiman kembali pengungsi Korea Utara di Korea Selatan dan menyebarkannya melalui berbagai media.

Kemudian dalam upaya membangun hubungan sosial antara migran Korea Utara dengan masyarakat asli, KHF berupaya untuk mempromosikan isu yang dihadapi migran “pembelot” Korea Utara, KHF kemudian memproduksi dan mendistribusikan berbagai publikasi dalam bahasa Korea dan Inggris. Hasil dari publikasi dari penelitian yang dilakukan KHF kemudian akan diterapkan dalam dua hal yakni⁴³:

a) Meningkatkan saling pengertian dan kesadaran. Korea Hana Foundation membentuk tim layanan sukarela migran Korea Utara, kampanye online dalam membentuk kesadaran masyarakat Korea Selatan terhadap migran “pembelot”, dan terakhir penerbitan majalah.

b) Mengembangkan kebijakan dukungan dari penelitian dan kajian Korea Hana Foundation mengembangkan kebijakan pendukung melalui penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan sebelumnya dan kemudian membentuk arsip terkait informasi dan jaringan kerjasama dengan organisasi dalam dan luar negeri.

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kesenjangan psikologis serta stigma negatif seperti diskriminasi yang terjadi antara penduduk Korea Utara dan Korea Selatan, sehingga mereka dapat merangkul pembelot Korea Utara sebagai sesama warga negara ataupun tetangga.

Untuk memastikan adanya peningkatan dalam integrasi *Korea Hana Foundation* melakukan survey dengan para pembelot di setiap tahunnya, ketika ditanya apakah mereka masih mengalami diskriminasi oleh warga asli Korea Selatan hanya sekitar 16,1% menjawab “Ya”, kemudian untuk mereka yang menjawab “Tidak” adalah sebanyak 83,9%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 presentase jawaban “Ya” telah menurun sebesar 1,9%⁴⁴.

Dengan terjadi penurunan pada indeks diskriminasi yang terjadi diantara kedua kelompok masyarakat tersebut, migran “pembelot” Korea Utara akan dapat lebih mudah dalam membentuk identitas mereka sebagai warga Korea Selatan, karena mereka telah merasa diterima dan dianggap sebagai satu kesatuan yang sama, dengan demikian penurunan tingkat diskriminasi ini telah mendorong integrasi nilai migran “pembelot” Korea Utara karena selama ini hal tersebut telah menjadi masalah integrasi sosial yang dihadapi sehingga mempengaruhi proses

⁴³ Korea Hana.(2023).”Who we are”, Diakses melalui <https://www.koreahana.or.kr/home/eng/contents.do?ptSignature=QnrvtOekxiPkIgsn74dfsYRAqgXaIX2EzU5d7cx8ePM%3D&menuPos=2>.

⁴⁴ Korea Hana Foundation (2021). “2021 Settlement Survey of North Korean Refugees in South Korea”. Diakses Melalui” <https://koreahana.or.kr/>”.

pembentukan identitas para pembelot sebagai warga Korea Selatan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil dari analisis tersebut dapat kita lihat bahwa keempat elemen dalam terbentuknya integrasi yang sebelumnya disebutkan dalam konsep integrasi migran yakni yayasan, fasilitator, hubungan sosial, dan penanda integrasi (Hanawon sebagai yayasan, kebijakan permukiman sebagai fasilitator,) dalam integrasi sistemik, kemudian (*Korea Hana Foundation* sebagai hubungan sosial, dan penanda integrasi) dalam integrasi nilai telah terbentuk dan bekerja dengan semestinya, dan dengan terhubungnya keempat elemen tersebut yang masing-masing mendorong integrasi sistemik dan nilai bagi migran “pembelot” Korea Utara di Korea Selatan maka sesuai dengan pendapat Krechel dalam penelitiannya tahun 1999, integrasi sosial yang sebenarnya akan dapat terjadi.

Keberhasilan kebijakan permukiman kembali dalam mendorong integrasi sosial tersebut juga dilihat dari hasil survey *Korea Hana Foundation* (penanda integrasi) yang dilakukan pada setiap tahun. Perkembangan dalam program-program yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan melalui Hanawon, dan Korea Hana Foundation yang membantu secara langsung membantu pemerintah dalam mendorong proses integrasi migran “pembelot” Korea Utara dapat dianggap telah berhasil dalam membawa peningkatan pada level kesejahteraan para migran Korea Utara di Korea Selatan di tahun 2021.

Hasil analisis ini dapat dilihat dalam survey *Korea Hana Foundation* yang menunjukkan perkembangan dari indeks kesejahteraan migran “pembelot” Korea Utara di Korea Selatan, survey

menunjukkan bahwa pada tahun 2021 indeks kesejahteraan telah mengalami peningkatan yakni dengan angka 76,5% merasa puas dan 20,9% merasa tidak puas⁴⁵. Maka dari itu dapat diartikan bahwa sebagian besar dari para migran “pembelot” Korea Utara pada tahun 2021 tersebut telah mencapai level dimana mereka dapat hidup di Korea Selatan dengan layak.

KESIMPULAN

Program *Resettlement Policy* yang disediakan Hanawon berhasil mengurangi masalah integrasi sosial yang dihadapi migran “pembelot” Korea Utara di Korea Selatan. Program edukasi kembali yang terdiri dari pelatihan softskill dan edukasi kembali terhadap Korea Selatan tersebut telah mendorong integrasi sistemik para migran, hal ini karena setelah melewati masa edukasi kembali selama dua bulan, migran Korea Utara mampu bersaing dalam dunia pekerjaan di lingkungan masyarakat Korea Selatan dan ikut berkontribusi dalam aktivitas perekonomian negara.

Pelaksanaan program dari *Resettlement Policy* pemerintah Korea Selatan yang berlandaskan pada undang-undang *North Korean Defector Protection And Settlement Support Act*, diberikan ketika para migran “pembelot” tersebut menyelesaikan proses edukasi kembali di Hanawon. Migran “pembelot” Korea Utara akan diberikan bantuan oleh pemerintah berupa, keuangan, subsidi rumah, mencari pekerjaan, dan jaminan kesejahteraan sosial. Melalui bantuan tersebut migran Korea Utara dapat merasakan hidup bebas dengan keuangan yang stabil setelah sekian lama memiliki pengalaman hidup yang buruk ketika masih berada di negaranya.

⁴⁵ Korea Hana Foundation (2021). “2021 Settlement Survey of North Korean Refugees in South Korea”. Diakses Melalui” <https://koreahana.or.kr/>”.

Dalam pelaksanaan program *Resettlement Policy*, pemerintah Korea Selatan juga menjalin kerjasama dengan organisasi non-profit (NPO) yakni *Korea Hana Foundation* (KHF) yang juga bekerja dalam menyediakan program bantuan permukiman kembali pemerintah serta berperan sebagai penanda integrasi bagi migran Korea Utara melalui promosi-promosi di media sosial dan survey tahunan yang dilakukannya.

Dengan terhubungnya integrasi sistemik dan nilai yang dilengkapi oleh keempat elemen dalam terciptanya integrasi tersebut maka integrasi sosial bagi migran Korea Utara akan dapat terjadi di Korea Selatan. Survey Korea Hana Foundation menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan migran Korea Utara di Korea Selatan pada tahun 2021 telah mencapai pada level dimana mereka dapat disebut telah terintegrasi dalam masyarakat Korea Selatan.

Daftar Pustaka:

BUKU

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. (2022).
- Zainul Bahri. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: PT Angkasa. (1996),

JURNAL

- Ager, Alastair, and Alison Strang. "Understanding integration: A conceptual framework." *J. Refugee Stud.* 21 (2008): 166.
- Cho, Jeanyoung Jeannie. "Systemizing the fate of the stateless North Korean migrant: A legal guide to preventing the automatic repatriation of North Korean migrants in China." *Fordham Int'l LJ* 37 (2013): 175.

- Cho, Seo-Young. "The effect of social identity on integration of social minorities: The case of North Korean refugees in South Korea." *International Area Studies Review* 25.1 (2022): 3-20.
- Chang, Yoonok, Stephan Haggard, and Marcus Noland. "Migration experiences of North Korean refugees: survey evidence from China." *Korea Yearbook* (2009). Brill, 2010. 301-328.
- Chung, Byung-Ho. "Between defector and migrant: Identities and strategies of North Koreans in South Korea." *Korean studies* (2008): 1-27.
- Lee, Eunkoo, and Brendan Howe. "North Korean Refugee Integration Policy in South Korea: Human Security Challenges." *Asian International Studies Review* 22.1 (2021): 65-90.
- Ha, Shang E., and Seung-Jin Jang. "National identity in a divided nation: South Koreans' attitudes toward North Korean defectors and the reunification of two Koreas." *International Journal of Intercultural Relations* 55 (2016): 109-119.
- Hough, Jennifer. "The contradictory effects of South Korean resettlement policy on North Koreans in South Korea." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 48.20 (2022): 4922-4940.
- Hough, Jennifer. "The racialization of North Koreans in South Korea: diasporic co-ethnics in the South Korean ethnolinguistic nation." *Ethnic and Racial Studies* 45.4 (2022): 616-635
- Kim, Myonghee. "A North Korean defector's journey through the identity-transformation process." *Journal of Language, Identity & Education* 15.1 (2016): 3-16.
- Kim, You Gene. *The odyssey of North Korean defectors: Issues and*

- problems in the migration process. City University of New York, 2015.
- Kim, Sung Kyung. "Defector," Refugee," or" Migrant"? North Korean Settlers in South Korea's Changing Social Discourse." *North Korean Review* (2012): 94-110.
- Kim, So Yoon, et al. "Is autism stigma higher in South Korea than the United States? Examining cultural tightness, intergroup bias, and concerns about heredity as contributors to heightened autism stigma." *Autism* 26.2 (2022): 460-472.
- Kim, Jih-Un, and Dong-Jin Jang. "Aliens among brothers? The status and perception of North Korean refugees in South Korea." *Asian Perspective* 31.2 (2007): 5-22.
- Kreckel, Reinhard. "Social integration, national identity and German unification." See Note 5 (1999): 114-44.
- Lee, Everett S. "A theory of migration." *Demography* 3 (1966): 47-57.
- Watson, Iain. "Paradoxical multiculturalism in South Korea." *Asian Politics & Policy* 4.2 (2012): 233-258.
- Yoon, In-Jin. "Social integration and well-being of North Korean migrants in South Korea." *Journal of Social Issues* 78.3 (2022): 627-644.
- ONLINE**
- Al Jazeera. North Korea's economy shrinks for second straight year. Diakses melalui” <https://www.aljazeera.com/economy/2022/7/27/north-koreas-economy-shrinks-for-second-straight-year-bok>”. (2022). Diakses pada 2 July 2023
- BBC Indonesia.” *Pembelot Korut: Apa yang terjadi ketika mereka tiba di Korea Selatan?*”. Diakses melalui [“https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56093415](https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56093415). (2021). Diakses pada 16 July 2023.
- CNN. " *Why some North Korean defectors return to one of the world's most repressive regimes*". Diakses melalui [“https://edition.cnn.com/2022/02/18/asia/north-korea-defectors-return-intl-hnk-dst/index.html](https://edition.cnn.com/2022/02/18/asia/north-korea-defectors-return-intl-hnk-dst/index.html). (2022). Diakses pada 15 July 2023.
- Detik News.Melihat pusat adaptasi sosial pembelot korut di korsel.” Diakses melalui” <https://news.detik.com/foto-news/d-6816627/melihat-pusat-pelatihan-adaptasi-sosial-pembelot-korut-di-korsel>”.(2023).Diakses pada 16 July 2023.
- Human Right Watch. North Korea Events of 2018 .Diakses Melalui” <https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/north-korea>.(2019). Diakses pada 12 Agustus 2023.
- Human Right Watch. North Korea: Economic System Built on Forced Labor. Diakses melalui” <https://www.hrw.org/news/2012/06/13/north-korea-economic-system-built-forced-labor>” .(2012). Diakses pada 10 Agustus 2023.
- Human Right Watch.World Report North Korea 2021.Diakses Melalui” <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/north-korea>.Pada 12 Januari 2023. (2021). Diakses pada 13 Agustus 2023.
- Ji Da Gyum. Inside Hanawon: How N. Korean defectors build a new life in S. Korea. Diakses melalui” www.koreaherald.com%2Fview.php%3Fud%3D20220710000202&usg=AOvVaw3NZNjyki1ffbKJ7r0HNsr&opi=89978449 .(2022). Diakses pada 29 Agustus 2023.

- Kementerian Unifikasi. Settlement Support for North Korean Defectors .Diakses melalui” https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/whatwedo/support/”.(2023). Diakses pada 15 July 2023.
- Kementerian Unifikasi. South-North Relations.Diakses melalui”https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/relations/infoNK/leadership/government/”.(2023). Diakses pada 13 July 2023.
- Kementerian Unifikasi. Manual for the Resettlement Support for North Korean Refugees. Diakses melalui” <https://www.nkeconwatch.com/nk-uploads/Manual-for-the-Resettlement-Support-for-North-Korean-Refugees.pdf>. (2013). Pada 1 September 2023.
- Korea Hana Foundation. “2021 Settlement Survey of North Korean Refugees in South Korea”. Diakses Melalui” <https://koreahana.or.kr/>”.(2021). Diakses pada 12 Agustus 2023.
- Korea Times. “North Korean refugees speak out: 'My Hanawon experience'”.Diakses Melalui “https://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2019/06/137_269828.html. (2021). Diakses pada 3 Agustus 2023.
- Law.Go.Kr. North Korean Defector Protection And Settlement Support Act.Diakses melalui [“https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?chrClsCd=010203&lsiSeq=206648&viewCls=engLsInfoR&urlMode=engLsInfoR#0000](https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?chrClsCd=010203&lsiSeq=206648&viewCls=engLsInfoR&urlMode=engLsInfoR#0000).(2021). Diakses pada 23 Agustus 2023.
- NK news.” *Settling in Seoul: How was the education center for new North Korean defectors?*”. Diakses melalui” <https://www.nknews.org/2022/04/settling-in-seoul-how-was-the-education-center-for-new-north-korean-defectors/>. (2022). Diakses pada 17 July 2023
- Ramsey G. Life After Escape for North Korean Defectors . Diakses melalui”<https://borgenproject.org/li-fe-after-escape-for-north-korean-defectors/>”.(2022). Diakses pada 15 July 2023.
- The Conversation. “*The North Korean who went home: many defectors struggle against discrimination in the South*”. Diakses melalui” <https://theconversation.com/the-north-korean-who-went-home-many-defectors-struggle-against-discrimination-in-the-south-174366>. (2022). Diakses pada 16 July 2023.
- The Guardian. “South Korea's 'unique' efforts to help defectors adapt to capitalism”. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2019/jan/28/south-koreas-unique-efforts-to-help-defectors-adapt-to-capitalism>.(2019). Diakses pada 2 July 2023.